

BAB II

KONDISI UMUM KESULTANAN ACEH PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SYAH IV AL MUKAMMIL (1589-1604) M

A. Kondisi Pemerintahan

Kemunculan Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil sebagai orang nomor satu di Kesultanan Aceh membawa satu era baru dalam sejarah perjuangan wanita di daerah tersebut. Dalam pemerintahannya ia melibatkan salah seorang wanita yang kemudian dijadikannya sebagai orang kepercayaan membantu dalam memerintah kesultanan. Dia adalah Laksamana Kumalahayati. Dalam menjalankan pemerintahan, keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Sangat wajar apabila menulis tentang Laksamana Kumalahayati di dalamnya juga dibahas tentang pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil. Meskipun demikian Laksamana Kumalahayati tidak memiliki otoritas penuh dalam menjalankan tugasnya, ia tetap tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh sultan. Laksamana Kumalahayati menjadi wanita kepercayaan Sultan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal tersebut berkaitan dengan adanya permasalahan yang terjadi di dalam kesultanan. Di samping juga karena melihat kepiawaian Kumalahayati dalam memimpin militer dan diplomasi.

Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil naik tahta setelah terjadinya krisis perebutan kekuasaan yang pada waktu itu terus meruncing. Terutama setelah Sultan ke sembilan dari Kesultanan Aceh yaitu Sultan Buyung alias Alauddin Riayat Syah (1586-1589)M putra Sultan Indrapura terbunuh pada tahun 1589 M.¹ Sultan tersebut naik tahta atas hasil mufakat dari para pembesar negara.² Sesuai tradisi untuk mencari penggantinya adalah pengangkatan sultan yang dipilih berdasarkan garis keturunan. Kemudian terpilihlah Raja Asyim yang usianya masih di bawah umur, tetapi belum sampai anak tersebut naik tahta ia juga terbunuh. Dan kemudian digantikanlah Raja Asyim tersebut dengan Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil. Ia berhasil naik tahta sebagai sultan dari Kesultanan Aceh yang ke sepuluh pada tahun 1589 M. Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil naik tahta ketika usianya sudah cukup tua. Usianya pada waktu itu adalah 94 tahun,³ tetapi ada juga sumber yang menyebutkan bahwa ketika naik tahta usinya sudah mencapai 100 tahun.⁴ Karena usia pengangkatannya yang cukup tua itulah kemudian di dalam istana muncul intrik-intrik yang berhubungan dengan suksesi kepemimpinan dan berbagai usaha untuk menyingkirkan Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil dari singgasananya. Meskipun dalam kondisi yang seperti demikian, namun Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil dalam menjalankan pemerintahannya sebagai

¹ Ibrahim Alfian, *Mata Uang Kerajaan-Kerajaan Aceh*, (Banda Aceh: Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh, 1983), hlm.34

² Moh. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Pengarang sendiri, 1961), hlm. 116

³ Ismail Sofyan, dll, *Wanita Utama Dalam Lintasan Sejarah (Prominent Women in The Glimpse of History)*, (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 1994), hlm. 31

⁴ Moh. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, hlm. 23

kepala pemerintahan di Kesultanan Aceh termasuk yang cukup lama, dibandingkan dengan sultan-sultan yang sebelumnya yang hanya memerintah selama beberapa tahun bahkan ada yang hanya beberapa bulan saja. Sedangkan Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil berhasil memerintah Kesultanan Aceh hampir lima belas tahun.⁵

Dalam menjalankan pemerintahannya Sultan Alauddin Riayat Syah IV termasuk seorang sultan yang cukup bijaksana. Hal tersebut terbukti dengan berhasilnya ia meredam berbagai konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam pemerintahannya.

Permasalahan yang banyak terjadi di dalam negara ketika Sultan Alauddin Riayat Syah IV berkuasa di antaranya adalah banyaknya pembunuhan dan juga kudeta yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menginginkan dirinya menjadi sultan. Apabila sultan yang terpilih pada waktu itu tidak bijaksana dan tidak memiliki kepribadian yang tangguh, maka kemungkinan konflik di Kesultanan Aceh yang lebih besar dapat muncul.

Setelah berhasil mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam negaranya, kemudian Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil dapat leluasa dalam usaha menjalin hubungan Internasional. Hubungan baik dengan bangsa asing yang mula-mula dibina adalah bangsa-bangsa Eropa, di antaranya adalah Portugis, Belanda dan Inggris. Hubungan baik dengan bangsa-bangsa asing tersebut adalah merupakan sesuatu yang baru dan istimewa di Kesultanan Aceh, karena pada masa pemerintahan-pemerintahan

⁵ M.C. Ricles, *Sejarah Indonesia Modern, Terj. Hardjowidjoyo Dharmono*, (Yogyakarta: UGM Press, 1998), hlm. 50

sebelumnya belum pernah ada yang berhasil menjalin hubungan baik dengan bangsa-bangsa tersebut. Dengan bangsa Portugis misalnya, sejak pertama kali didirikan Portugis adalah merupakan musuh paling besar yang harus dihadapi. Akan tetap karena kebijaksanaan Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil, hal tersebut sudah tidak terjadi. Sikap Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil terhadap bangsa tersebut berbeda dengan sultan-sultan terdahulu yang menganggapnya sebagai musuh. Dalam hal ini sultan menganggap bangsa-bangsa tersebut merupakan bangsa yang dapat memberikan nilai tambah apabila disikapinya dengan baik. Sultan Aluiddin Riayat Syah IV al Mukammil merasa jenuh dengan permusuhan-permusuhan yang terus terjadi di wilayah kekuasaannya karena itulah kemudian ia berusaha menjalin hubungan baik dengan bangsa tersebut. Sultan percaya bahwa dengan menjalin hubungan baik dengan bangsa tersebut Kesultanan Aceh akan mengalami kemajuan. Bahkan dalam hubungan diplomatiknya dengan bangsa Belanda, Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil adalah merupakan sultan yang pertama kali memberikan pengakuan *de jure* terhadap Belanda yang baru didirikan sesudah mereka mendapatkan kemenangan dalam revolusinya mengalahkan penjajah Portugis.⁶

Selain dengan bangsa-bangsa Eropa tersebut di atas, Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil juga terus bergiat memperbaiki perhubungan yang telah terjalin antara Kesultanan Aceh dengan negara-negara Islam di Benua Kecil India. Dalam menjalin hubungan

⁶ Tamar Djaya, *Pustaka Indonesia Riwayat Hidup Orang-orang Besar Tanah Air*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 178

baik dengan bangsa-bangsa tersebut, Sultan tidak percaya begitu saja akan tetapi ia tetap waspada dan berhati-hati. Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil tetap memperkuat armadanya apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Laksamana Kumalahayati adalah wanita yang ia beri kepercayaan dalam hal ini.

B. Kondisi Sosial – Ekonomi

Tingkat ekonomi pada suatu bangsa seringkali dijadikan sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan secara menyeluruh. Kondisi Ekonomi di Kesultanan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil bisa dikatakan berhasil. Pada masa pemerintahan tersebut perekonomian kesultanan mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa beberapa pemerintahan sebelumnya. Salah satu langkah untuk memperkuat perekonomian Kesultanan Aceh dengan menjalankan politik perdagangan yang telah dilakukan oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil politik perdagangan tersebut dilanjutkan. Langkah tersebut dilakukan yaitu salah satunya dengan cara memperhebat penanaman lada. Lada hasil dari penanaman milik kesultanan dijual oleh sultan melalui para pejabat-pejabatnya. Pedagang-pedagang asing yang ingin berdagang di daerah takhlukan Kesultanan Aceh harus meminta ijin dari Sultan.

Pada waktu lada itu termasuk salah satu barang yang sangat dicari dan sangat laku di pasaran Eropa, karena banyaknya manfaat yang didapatkan dari lada tersebut. Di negara-negara Eropa manfaat

lada diantaranya adalah untuk menambah cita rasa dalam makanan disamping itu lada juga dapat dimanfaatkan untuk menghangatkan badan karena di negara-negara tersebut pada umumnya udara sangat dingin. Salah satu ukuran takar dalam jual beli lada pada waktu itu adalah bahar, satu bahar beratnya 360 pond Inggris, harganya adalah 35 gulden Belanda.⁷ Untuk alat jual beli menurut John Davis, pada masa pemerintahan ini ada dua jenis mata uang yang berlaku dan beredar, yaitu uang emas yang bentuknya sebesar uang sen di Inggris dan mata uang dari timah yang disebut *casches* (keuh). Selain dua jenis mata uang utama tersebut, juga ada mata uang jenis lain yaitu kupang, pardu dan tahlil. Nilai 1600 *casches* sama dengan 1 uang emas, 400 *casches* adalah 4 kupang, 4 Kupang sama dengan 1 uang emas, 5 uang emas sama dengan 4 *schelling (sic)* Inggris, 4 uang emas sama dengan 1 pardu dan 4 pardu sama dengan 1 tahlil.⁸

Hasil dari penanaman lada itulah yang kemudian menjadi omset besar bagi perekonomian di Kesultanan Aceh, sehingga menjadikan kemakmuran rakyat Aceh semakin bertambah. Apalagi pada masa pemerintahan ini, Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil baru saja menjalin hubungan damai dengan bangsa-bangsa asing seperti; Portugis. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pihak kesultanan selalu menyerang kapal-kapal Portugis yang melewati perairan Kesultanan dan Selat Malaka. Akan tetapi pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil tidak demikian. Orang-

⁷ Moh. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Pengarang Sendiri, 1962), hlm. 124

⁸ Muhammad Ibrahim, dkk, *Sejarah Daerah Propinsi Aceh*, cet. Ke-2, (Jakarta: Depdikbud, 1991), hlm. 72-73

orang Portugis diberi kebebasan untuk datang dan berdagang di ibukota Kesultanan Aceh. Hal ini merupakan sebuah keuntungan pula bagi Kesultanan Aceh, karena hasil perdagangan lada semakin meningkat. Pada waktu itu menurut perkiraan orang-orang Portugis yang berada di sana, Kesultanan Aceh telah mengekspor lada sebanyak 500 barek setiap tahunnya.⁹ Selain digunakan untuk memakmurkan rakyat Kesultanan Aceh, hasil dari perdagangan lada juga dimanfaatkan untuk membangun Kesultanan Aceh terutama armada perangnya, termasuk armada laut yang dikomandoi oleh Laksaman Kumalahayati. Strategi politik ekonomi yang dijalankan Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil berhasil membangun kembali perekonomian Kesultanan Aceh yang merosot akibat huru - hara yang terjadi di dalam dan juga akibat kerugian peperangan. Pada masa itu, sultan membuka empat buah bandar besar di dalam Kesultanan Aceh yaitu Kota Raja, Daya, Pidie dan Pasai.¹⁰

Aktivitas perdagangan di Kesultanan Aceh tidak hanya dilakukan oleh kalangan rakyat jelata saja, tetapi juga dilakukan oleh para pembesar kesultanan termasuk juga keluarga sultan. Hal ini sudah menjadi tradisi sejak Aceh belum menjadi negara Islam.¹¹ Salah satu langkah yang ditempuh oleh Sultan-sultan Aceh, termasuk Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil dalam bidang perdagangan adalah dengan mengirim syahbandar-syahbandar ke pelabuhan-pelabuhan untuk mengurus dan mengawasi perdagangan. Selain dari

⁹ *Ibid.* hlm. 92

¹⁰ H.M. Zaenuddin, *Tarich Aceh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hlm.

¹¹ Sartono Kartodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm.

hasil perdagangan perekonomian Kesultanan Aceh juga mendapatkan pemasukan dari bea cukai yang dikenakan bagi kapal-kapal asing yang keluar masuk ke pelabuhan Kesultanan Aceh. Setiap kapal yang mengangkut barang dagangan di pelabuhan dipungut pajak sebesar 5 % dari harga barang-barang itu. Selain itu dari ketiga wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh juga diwajibkan untuk membayar upeti kepada pemerintah. Ketiga kerajaan tersebut adalah Pidie, Aru dan Minangkabau.¹² Dari pembayaran-pembayaran tersebut menjadikan penghasilan pemerintah bertambah. Penghasilan lain selain dari perdagangan dan pajak adalah penyitaan apabila ada kapal asing yang menyangkut barang dagangan terkandas di pantai kesultanan .

Letak dan kondisi geografis Kesultanan Aceh juga memberikan keuntungan yang terbesar bagi rakyat Kesultanan Aceh. Letak Kesultanan Aceh yang berada di wilayah ujung barat Sumatra memudahkan bagi bangsa-bangsa asing untuk mengadakan perjalanan dagang melalui jalur laut. Pusat-pusat perdagangan Kesultanan Aceh berada di sepanjang pantai utara.

C. Kondisi Sosial Keagamaan

Kesultanan Aceh merupakan wilayah pertama di tanah air yang menganut agama Islam. Sejak Kesultanan Aceh didirikan, pendidikan Islam telah mengambil tempat yang terdepan dalam pembangunan

¹² Tamardjaya, *Pusaka Indonesia Riwayat Hidup Orang-orang Besar Tanah Air*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 177

bangsanya.¹³ Penyebaran Agama Islam di Kesultanan Aceh tidak bisa dilepaskan dengan adanya perpindahan pusat perdagangan dari Malaka ke Kesultanan Aceh. Banyak pedagang-pedagang muslim yang dahulunya berdagang di Malaka kemudian pindah ke Kesultanan Aceh setelah Malaka berhasil dikuasai oleh bangsa Portugis. Dari adanya interaksi dengan pedagang-pedagang muslim inilah masyarakat Kesultanan Aceh lambat laun mulai mengenal dan mengerti tentang ajaran Islam. Sehingga dari keterangan tersebut memunculkan kesan bahwa ajaran Islam berkembang di Kesultanan Aceh karena adanya unsur ketidaksengajaan. Akan tetapi ada juga keterangan yang menyebutkan bahwa ajaran Islam berkembang di Kesultanan Aceh karena ada unsur kesengajaan. Maksudnya adalah bahwa Islam berkembang di Kesultanan Aceh karena memang sengaja disebarkan oleh para ulama, sebagaimana keterangan yang terdapat dalam dua buah sumber utama Melayu, yakni "Sejarah Melayu" dan "Hikayat Raja-raja Pasai". Keduanya mengisahkan bahwa Islam pertama kali datang ke Kesultanan Aceh dibawa oleh seorang pengembang agama Islam yakni nakhkoda Syekh Ismail yang datang dari Makah. Beliau datang ke Sumatera memang sengaja bertujuan untuk mengislamkan Marah Silau yang kemudian menjadi Sultan Malikus Saleh, raja Pasai yang pertama. Mereka menyebarkan agama Islam dengan berpindah-pindah di wilayah Sumatra, termasuk Lamuri yang kemudian dikenal dengan Kesultanan Aceh. Berdasarkan keterangan tersebut dapat

¹³ A. Hasmy, *Peranan Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 7

dipastikan atau ada alasan bahwa seluruh wilayah Kesultanan Aceh sudah beragama Islam semua dalam abad ke XIII.¹⁴

Pada pertengahan abad ke XVI, Pendidikan Islam telah merajai seluruh cabang dan segi kehidupan masyarakat Kesultanan Aceh. Hal tersebut terus berlanjut hingga pada masa pemerintahan berikutnya, termasuk pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil. Islam dan masyarakat Kesultanan Aceh benar-benar telah menyatu dan juga menjiwai seluruh cabang kehidupan, baik itu kehidupan politik, ekonomi, kehidupan sosial ataupun kehidupan budaya.¹⁵



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ Moh. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, hlm. 76

¹⁵ A.Hasmy, *Peranan Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, hlm.8

BAB III

LAKSAMANA KUMALAHAYATI

A. Sosok Laksamana Kumalahayati

Apabila dilihat dari silsilah Kumalahayati atau yang memiliki nama panggilan Malahayati ini berasal dari kalangan Sultan-sultan Aceh terdahulu. Ia adalah keturunan keempat dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah (1513-1530)M. Pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang telah berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah tersebut. Ayahnya bernama Mahmud Syah, seorang laksamana. Kakeknya dari garis ayah juga seorang laksamana, yaitu Muhammad Syaid Syah. Jiwa kebaharian dan kelautan yang tertanam pada diri Kumalahayati sejak kecil merupakan warisan dari ayah dan kakeknya.¹

Laksamana Kumalahayati tumbuh dan dewasa di lingkungan kesultanan. Hal tersebut dapat diketahui dan dilihat bagaimana ketika ia bersama Cut Meurah Insen turut mengasuh dan mendidik Munawar Syah, cucu dari Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil. Mereka mendidik terutama dalam hal bertutur kata dan budi bahasa serta latihan ibadah. Mereka turut mendidik Munawar Syah sampai usia enam tahun, karena untuk selanjutnya cucu Sultan tersebut dipanggilkan guru.² Dari pernyataan tersebut paling tidak dapat diketahui bahwa Kumalahayati adalah wanita yang cerdas, taat

¹ Solichin Salam, *Malahayati Srikandi dari Aceh*, hlm. 25

² A. Hasymy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 26

beribadah, terdidik dan mengetahui serta mengerti tentang ilmu-ilmu keagamaan.

Mengenai tempat dan tanggal lahir Laksamana Kumalahayati, penulis belum menemukan data tentang hal tersebut. Mengenai waktu wafatnya adalah hampir berdekatan dengan wafatnya Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil (Sultan yang telah berjasa mengangkat nama besar Kumalahayati) yaitu bulan Zulhijjah 1012 H (Mei 1605)M. Tidak lama kemudian setelah wafatnya Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil, Laksamana Kumalahayati juga wafat.³ Laksamana Kumalahayati dimakamkan di Lereng Bukit Kota Dalam, sebuah bukit yang terletak di Desa Nelayan Kreung Raya. Jaraknya dengan Kota Banda Aceh kurang lebih 34 Km. Makamnya berdampingan dengan makam Laksamana Muda Pocut Meurah Insan (wanita yang dahulu pernah bersama ketika masih remaja dan yang kemudian wakilnya dalam pemerintahan).⁴

Di Kesultanan Aceh, pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam bidang pendidikan. Begitu juga dengan pada masa ketika Kumalahayati masih remaja. Tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk menuntut ilmu di sebuah lembaga pendidikan. Hal tersebut terbukti dengan dimasukkannya Kumalahayati oleh orang tuanya di sebuah sekolah dan tidak tanggung-tanggung sekolah tersebut adalah sekolah Akademi Militer, yang mungkin untuk saat ini saja sangat jarang seorang wanita

³ *Ibid*, hlm.37

⁴ Solichin Salam, *Malahayati Srikandi dari Aceh*, hlm. 35

bersekolah di sekolah dimana Kumalahayati waktu itu menempuh pendidikan. Sekolah tersebut bernama *Ma'had Baitul Maqdis*, sebuah lembaga pendidikan yang didirikan di Kesultanan Aceh atas bantuan dari pemerintah Turki. Mengingat kembali berdirinya lembaga pendidikan tersebut adalah bahwa sekolah tersebut didirikan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah al Qahhar (1537-1571)M. Pada masa tersebut hubungan antara Kesultanan Aceh dengan pemerintah Turki sangat erat. Untuk lebih mempererat hubungan tersebut kira-kira tahun 1567 M, Sultan Turki yang bernama Sultan Salim II mengirim bantuan kepada pemerintah Kesultanan Aceh, di antaranya adalah terdiri atas tenaga-tenaga ahli militer dan insinyur perkapalan. Mereka-mereka itulah yang kemudian menjadi tenaga pengajar di Sekolah *Ma'had Baitul Maqdis*.

Ma'had Baitul Maqdis tempat Kumalahayati menuntut ilmu, membuka dua jurusan yaitu terdiri dari jurusan kelautan dan jurusan darat. Kumalahayati tentu saja masuk jurusan kelautan, sesuai dengan jiwa serta bakat yang dimilikinya sejak kecil. Kumalahayati termasuk wanita yang beruntung ia dapat mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.⁵ Bahkan di sekolah tersebut ia juga menemukan jodohnya yang wafat ketika terjadi pertempuran besar-besaran melawan Portugis. Itulah mungkin salah satu pendidikan yang bisa dikatakan sebagai pendidikan formal yang telah ditempuh oleh Kumalahayati ketika ia masih remaja.

⁵ *Ibid*, hlm. 26

Selain pendidikan formal yang telah diperolehnya di *Ma'had Baitul Maqdis*, Kumalahayati juga memperoleh pendidikan non formal yaitu di lingkungan keluarganya atau tempat tinggalnya. Pendidikan agama Islam adalah salah satunya dan juga bahasa. Kumalahayati mampu menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kedua bahasa tersebut mampu dikuasai oleh Kumalahayati dengan baik. Kemampuannya menguasai kedua bahasa tersebut memudahkan Kumalahayati untuk berkomunikasi dan juga memberikan penjelasan segala permasalahan yang berhubungan dengan bangsa asing. Kemampuan berbahasa Arab Kumalahayati terlihat ketika Kumalahayati melakukan pembicaraan dengan James Lancaster.

B. Pengangkatan Kumalahayati Sebagai Laksamana

Laksamana Kumalahayati adalah seorang wanita pertama di Kesultanan Aceh yang berhasil dipercaya oleh salah satu sultan untuk mendampingi dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa sultan yang dimaksud adalah Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil. Pengangkatan Kumalahayati merupakan hal yang belum pernah ada atau belum pernah ditemukan pada masa-masa pemerintahan sebelumnya. Apalagi Kumalahayati diangkat oleh Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil menjadi laksamana sekaligus juga sebagai dewan protokoler. Dari sudut pandang jender, Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil termasuk sultan dari Kesultanan

Aceh pertama yang tidak membedakan jenis kelamin dalam mengangkat para pembantunya. Pengangkatan Kumalahayati karena ada faktor-faktor yang memungkinkan seorang wanita dapat diangkat menjadi laksamana. Faktor tersebut adalah faktor yang berasal dari diri Kumalahayati sendiri (faktor intern) ataupun faktor luar yang bukan berasal dari diri Kumalahayati (faktor ekstern).

Faktor utama atau faktor intern atas pengangkatan Kumalahayati menjadi laksamana adalah bahwa dalam diri Kumalahayati sudah ada jiwa kebaharian yang sudah melekat sejak kecil, ditambah lagi dengan jenjang pendidikan yang telah ia tempuh di *Ma'had Baitul Maqdis*. Keberanian dan keuletannya dalam bertempur melawan musuh tidak dapat diragukan lagi, hal tersebut terbukti dengan berhasilnya memimpin pasukan *Inong Balee*. Sehingga pantas jika Kumalahayati akhirnya diangkat dan dijadikan sebagai orang kepercayaan atau orang nomor satu setelah sultan di pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil.

Faktor kedua, faktor pengangkatan Kumalahayati yang tidak berasal dari dalam diri Kumalahayati adalah munculnya intrik-intrik di kesultanan dalam hubungannya dengan suksesi kepemimpinan.⁶ Dalam hal ini ada upaya-upaya dari orang-orang di sekeliling sultan yang menginginkan agar Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil segera meletakkan jabatan. Dengan begitu kecurigaan sultan terhadap laki-lakipun muncul, sehingga sampailah ia pada keputusan

⁶ Rusdi Sufi, dkk, *Wanita Utama*, hlm.31

terakhirnya yaitu mengangkat seorang wanita untuk menjabat sebagai laksamana.

Sebagaimana pengangkatan pejabat-pejabat pemerintahan pada masa sekarang yaitu diawali dengan pengambilan sumpah jabatan. Pada masa pengangkatan Laksamana Kumalahayati pun juga demikian. Dalam hal ini ia bersumpah kepada Allah SWT, bahwa ia akan berjuang mati-matian sampai tetes darah penghabisan untuk menghadapi musuh-musuh Kesultanan Aceh. Bagaimana wujud nyata dari peran serta Kumalahayati sebagai laksamana akan dibahas pada topik pembahasan selanjutnya.

Dengan resminya dilantik sebagai laksamana, Kumalahayati adalah merupakan wanita muslimah pertama di seluruh nusantara bahkan di Asia, yang berposisi seperti dia sampai beberapa kemudian belum ada seorang wanitapun yang berhasil menyamai kedudukannya. Laksamana merupakan pangkat tertinggi dalam angkatan laut. Tugasnya adalah mengamankan wilayah perairan di Kesultanan Aceh. Mengingat letak Kesultanan Aceh yang sebagian besar dikelilingi oleh perairan dan juga menjadi pusat perdagangan dunia. Jabatan Kumalahayati sangat penting, sehingga perlu untuk mengangkat seorang laksamana yang memiliki jiwa serta semangat yang tangguh dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi musuh. Hal itu dilihat Sultan ada pada Kumalahayati. Dalam menjalankan tugasnya, kodrat sebagai seorang wanita tidak menjadi penghalang bagi Laksamana Kumalahayati untuk terus berjuang mempertahankan Kesultanan Aceh.

C. Motivasi Kumalahayati Terlibat Dalam Pemerintahan Kesultanan Aceh

Keterangan pada pembahasan sebelumnya telah menyebutkan bahwa Ajaran Islam benar-benar telah menjiwai seluruh cabang kehidupan.⁷ Melihat kondisi Kesultanan Aceh yang demikian sehingga sangat wajar apabila setiap langkah perjuangan yang ditempuh oleh pejuang-pejuang di Kesultanan Aceh selalu dilandasi dengan semangat *jihad fi sabilillah*, semangat untuk mempertahankan bangsa yang sesuai dengan jalan Allah SWT. Tidak terkecuali Laksamana Kumalahayati, sebagaimana janjinya ketika ia diambil sumpah jabatan bahwa ia berjanji dengan menyebut nama Allah (Insyah Allah), akan berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan Kesultanan Aceh dari musuh-musuh bangsa yang berniat menghancurkan bangsanya. Dalam ajaran Islam, sumpah atau janji adalah merupakan tugas atau tanggung jawab yang besar untuk dijalankan. Hal tersebut disadari betul oleh Laksamana Kumalahayati, yang kemudian menjadikannya sebagai semangat yang paling mendasar untuk melangkah dalam mejalani tugasnya sebagai seorang Laksamana. Dalam menjalankan tugasnya, Laksamana Kumalahayati memperlihatkan bahwa ia memang bersungguh-sungguh dan memiliki keberanian yang nyata dalam menghadapi musuh.

Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk tetap diam ketika di negaranya terjadi kedhaliman dan juga penjajahan masih

⁷ A. Hasyim, *Peranan Islam Dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 8

menimpanya. Apalagi jika melihat kondisi Kesultanan Aceh yang pada waktu itu menghadapi serangan besar-besaran yang mengakibatkan banyaknya laki-laki yang menjadi korban dalam menghadapi bangsa Portugis. Apabila para wanita yang masih tersisa tidak turun tangan dan bergabung dengan para pejuang laki-laki yang masih tersisa dapat mengakibatkan kehancuran bangsanya dan mereka akan mengalami masa penjajahan yang berkepanjangan. Dengan demikian tidak ada alasan bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam pertempuran dan juga dalam pemerintahan.

Di Kesultanan Aceh sendiri, pada abad ke 17 telah lahir seorang ulama besar terkemuka, bernama Syekh Abdurrauf bin Ali al Fansuri al Singkili. Dia adalah seorang ahli Fiqh dan Tasawuf yang beraliran Sattariyah serta bermazab Ahli Sunnah wal Jama'ah. Semasa hidupnya ia pernah memberikan fatwa, bahwa wanita diperbolehkan menjadi penguasa atau pemimpin.⁸ Fatwa tersebut terbukti menjadi pedoman bagi masyarakat di Kesultanan Aceh sebab setelah Kumalahayatipun, Kesultanan Aceh selama beberapa periode pemerintahan juga dipimpin oleh wanita.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁸ Solichin Salam, *Malahayati Srikandi dari Aceh*, hlm. 19

BAB IV
PERAN LAKSAMANA KUMALAHAYATI
DI KESULTANAN ACEH

A. Peran Kumalahayati Sebagai Laksamana

Dalam bab ini penulis akan memaparkan apa saja peran Laksamana Kumalahayati di Kesultanan Aceh yang menimbulkan atau memunculkan perhatian besar dari berbagai kalangan, termasuk dari penulis. Terkait dengan tindakan-tindakan atau perilaku Laksamana Kumalahayati dalam mengambil keputusan di negaranya. Anggapan masyarakat bahkan hingga saat ini yang menyebutkan bahwa wanita merupakan makhluk yang lemah, sebenarnya sudah mampu ditepis oleh Laksamana Kumalahayati, seorang pahlawan wanita yang masa hidupnya jauh berabad-abad sebelum dari zaman sekarang. Pahlawan wanita dari Kesultanan Aceh ini mampu menepis anggapan tersebut dengan melakukan berbagai tindakan nyata.

Salah satu bentuk peran nyata Laksamana Kumalahayati di Kesultanan Aceh yang melibatkan kaum wanita adalah pembentukan sebuah pasukan, yakni pasukan *Inong Balee*. Ide pembentukan pasukan tersebut muncul dari diri Kumalahayati. Kemudian ia menyampaikan ide tersebut setelah Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil naik tahta dan ia juga telah dilantik menjadi laksamana. Penyampaian ide tersebut sekaligus untuk meminta ijin resmi atas pendirian pasukan tersebut. Permohonan tersebut diterima serta

mendapat sambutan yang cukup baik dari sultan.¹ Perhatian sultan terhadap pasukan tersebut cukup besar yaitu dengan disediakannya berbagai fasilitas.

Kata "*Inong Balee*" berasal dari bahasa Aceh yang artinya adalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau dengan kata lain adalah janda. Jadi pengertian dari pasukan *Inong Balee* merupakan sebuah pasukan yang prajuritnya terdiri dari para janda yang suaminya syahid di medan pertempuran melawan bangsa Portugis. Pertempuran dengan Portugis terjadi akibat adanya pertentangan agama dan kemudian berujung pada persaingan politik dan ekonomi.² Pertempuran terjadi di Teluk Haru dan berakhir dengan hancurnya armada Portugis. Meskipun armada Portugis berhasil dihancurkan, tetap saja banyak prajurit Kesultanan Aceh yang gugur di medan pertempuran tersebut. Prajurit yang gugur termasuk suami dari Laksamana Kumalahayati.³ Dari peristiwa itulah semangat untuk balas dendam atas kematian suaminya muncul, sehingga dibentuklah pasukan *Inong Balee* yang tujuan awalnya adalah bertekad untuk membalas dendam atas kematian suaminya. Meskipun pada perkembangan selanjutnya tujuan dari didirikannya pasukan tersebut meluas yaitu untuk mempertahankan wilayah Kesultanan Aceh dari serangan-serangan bangsa asing dan tidak hanya bangsa Portugis.

Pasukan *Inong Balee* menjadi pasukan andalan di tanah Aceh. Laksamana Kumalahayati berhasil menghimpun pasukan yang cukup

¹ Rusdi Sufi, dkk, *Wanita Utama*, hlm. 32

² Moh. Ali, *Peranan Bangsa Indonesia Dalam Sejarah Asia Tenggara*, (Jakarta: Bhratara, 1963), hlm. 119

³ Solichin Salam, *Malahayati Srikandi dari Aceh*, hlm. 28

besar. Pada mulanya anggotanya berjumlah seribu orang, kemudian pada perkembangan selanjutnya pasukan ini anggotanya mencapai lebih dari dua ribu pasukan yang terdiri dari para wanita janda yang gagah-gagah, tangkas serta berani. Hal tersebut menunjukkan bahwa respon masyarakat khususnya kaum wanita janda adalah baik, mereka dengan suka rela bergabung tanpa ada paksaan untuk menjadi anggota pasukan *Inong Balee* karena adanya perasaan senasib, adanya kesadaran untuk membela serta mempertahankan tanah airnya begitu besar.

Pasukan *Inong Balee* sudah berkali-kali ikut bertempur di Selat Malaka dan Pantai-pantai Timur Sumatra dan Melayu.⁴ Untuk kepentingan ini dan sebagai tempat berkumpul mereka, maka didirikanlah atau dibangunlah sebuah benteng. Benteng itu dalam istilah masyarakat Aceh dikenal dengan istilah "*Kuta Inong Balee*" yang artinya adalah benteng wanita janda. Selain sebagai tempat untuk berkumpul, benteng itu juga dijadikan sebagai tempat untuk mengintai kedatangan kapal ke pelabuhan Kesultanan Aceh karena terletak 100 meter di atas permukaan laut. Menurut perkiraan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bentuk asli dari benteng tersebut adalah persegi panjang, dengan panjang sisi barat mencapai 84 meter, sisi utara mencapai 18 meter, ketinggian mencapai 2,5 meter dan dilengkapi dengan 3 lubang pengintai terowongan.⁵ Dari benteng itulah

⁴ A.Hasymy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, hlm. 2

⁵ Lebih lanjut lihat di <http://www.kompas.com/utama/news/0309/01/20202444>

para pasukan *Inong Balee* turun bertempur di atas geladag kapal ataupun di darat melawan Belanda dan juga Portugis.

Pada saat Kumalahayati menjadi laksamana, bisa dikatakan bahwa Kesultanan Aceh juga memiliki perlengkapan armada laut yang cukup kuat. Perlengkapan itu terdiri dari 500 buah kapal layar, 100 buah kapal perang (*Galey*), di antaranya ada yang berkapasitas muatan sampai 400 hingga 500 penumpang. Selain ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan besar Kesultanan Aceh sendiri, kapal-kapal itu juga ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah kekuasaan atau pengaruh Kesultanan Aceh, misalnya; Daya dan Pedir. Daya atau Pedir (*Pidie*) merupakan sebuah kesultanan di kawasan Aceh Barat. Berkat kegigihan Sultan Ali Mughayat Syah, keduanya berhasil ditakhlukkan yang kemudian disatukan di bawah pemerintahan Kesultanan Aceh. Daya berhasil ditakhlukkan pada tahun 1520 M, sedangkan Pedir berhasil ditakhlukkan pada tahun 1521 M.⁶

Kapal-kapal tersebut di atas berada di bawah koordinasi Laksamana Kumalahayati. Seorang warga berkebangsaan Inggris, bernama John Davis (yang menjadi nakhkoda pada sebuah kapal Belanda) yang mengunjungi pada masa Kumalahayati menjadi laksamana menyaksikan sendiri kehebatan armada laut Kesultanan Aceh yang dimiliki. Selain armada-armada laut terpenting yang dimiliki pada masa Laksamana Kumalahayati di daratpun juga memiliki pasukan gajah. Gajah-gajah tersebut merupakan kekuatan inti pasukan daratnya yang berjumlah 900 ekor. Binatang-binatang itu

⁶ A. Hasmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (...), PT. Al Ma'arif, 1993), hlm. 232

telah dilatih untuk bisa beradaptasi ketika dalam kondisi kekuatan perang. Misalnya; gajah-gajah tersebut dilatih untuk tidak takut api dan juga suara-suara tembakan. Selain untuk mengamankan wilayah, gajah-gajah tersebut juga digunakan untuk menyambut kedatangan tamu asing di wilayah Kesultanan Aceh. Misalnya, ketika James Lancaster datang ke Kesultanan Aceh, ia bersama rombongan disediakan beberapa ekor gajah yang badannya besar-besar, tingginya mencapai 14 kaki, gajah-gajah tersebut yang akan membawa para tamu masuk ke dalam Kesultanan atau istana. Gajah-gajah tersebut dipasang tempat duduk yang tertutup, sehingga membuat nyaman bagi yang mengendarai. Gajah-gajah tersebut juga diberi pakaian dan hiasan.⁷ Gajah-gajah tersebut di Kesultanan Aceh dapat dijadikan sebagai lambang kekuatan atau kejayaan Kesultanan Aceh.

Perlengkapan-perengkapan sebagaimana tersebut di atas terus diupayakan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil agar keamanan di wilayah Kesultanan Aceh tetap terpelihara. Biaya untuk pembelian serta perawatan semua itu diperoleh dari hasil perdagangan lada dan dari hasil bea cukai perdagangan.⁸ Akan tetapi, ketika Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil turun tahta, semua perlengkapan tersebut menjadi tidak terurus karena sultan yang menggantikan kurang bijaksana dan bodoh. Perekonomian semakin mundur dan keadaan sosial politik sangat gawat. Sementara angkatan perang sudah kocar-kacir dan yang paling menyedihkan, pada masa

⁷ Muhammad. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, hlm. 135

⁸ A. Hasmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, hlm. 239

pemerintahan tersebut pasukan *Inong Balee* yang pembentukannya diprakarsai oleh Laksamana Kumalahayati juga dibubarkan. Pasukan gajah yang tidak terurus sebagaimana mestinya itu juga banyak yang mati dan juga lari ke hutan.

Sebagai seorang yang dipercaya sebagai Laksamana, Kumalahayati sangat bertanggung jawab terhadap keamanan di wilayah kesultanan Aceh. Tanggung jawab yang besar yang diemban oleh Kumalahayati sebagai laksamana diwujudkan dengan cara turun tangan secara langsung dalam menghadapi musuh. Ia selalu memantau keamanan kondisi bangsanya, ketika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Kedatangan bangsa asing yang tidak sesuai dengan prosedur atau yang dinilainya akan merugikan rakyat Kesultanan Aceh, maka bersama pasukannya Laksamana Kumalahayati langsung bertindak setelah mendapat persetujuan dari Sultannya. Selama Laksamana Kumalahayati bertugas banyak peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan dirinya terjadi di Kesultanan Aceh.

Sebuah peristiwa penting dan juga menjadi ujian berat bagi Laksamana Kumalahayati adalah peristiwa pada tahun 1599 M, tepatnya pada tanggal 29 Juni yaitu datangnya dua buah kapal asing berkebangsaan Belanda yang bernama *de Leeuw* dan *de Leeuwin*, dua buah kapal tersebut masing-masing dipimpin oleh dua bersaudara yaitu Cornelis de Houtman dan Frederick de Houtman. Mereka ini adalah mata-mata dari saudagar Belanda. Mereka dianggap ahli dan dapat dipercaya kesanggupannya mencari perhubungan di wilayah timur. Sebelum menemukan Kepulauan Nusantara, mereka bekerja

pada saudagar-saudagar Portugis yang pernah berhubungan ke Asia. Melalui pengalamannya bekerja pada saudagar-saudagar Portugis itulah kemudian mereka berani dan berhasil menemukan Kepulauan Nusantara. Wilayah di Kepulauan Nusantara yang berhasil mereka datangi pertama kali adalah Banten yaitu pada tahun 1595 M, sebelumnya mereka telah singgah di Madagaskar. Di Banten pada mulanya rombongan mereka mendapat sambutan yang cukup baik. Akan tetapi pada akhirnya tidak demikian karena mereka banyak bersikap kasar dan tidak sopan. Bahkan di Banten mereka sempat ditahan, mereka tinggal di Banten dari September 1595 sampai Februari 1596, kemudian mereka berhasil pergi dan meninggalkan Banten untuk kembali ke negaranya setelah membayar uang tebusan.⁹ Hal tersebut juga terjadi ketika rombongan dua bersaudara tersebut berkunjung ke Pulau Madura. Di pulau tersebut mereka juga bertindak kurang ajar, sehingga menimbulkan tidak dimungkinkannya dibuka kembali hubungan dagang dengan bangsa Belanda.¹⁰

Dalam jangka waktu dua tahun kemudian setelah rombongan de Houtman datang ke Banten yaitu tepatnya pada tanggal 15 Maret 1598, mereka berangkat lagi menuju Kepulauan Nusantara, kali ini yang dituju adalah Kesultanan Aceh. Setelah berlayar melalui pulau-pulau Komoro dan Maladewa mereka berlabuh dan sampai di Kesultanan Aceh pada tanggal 29 Juni 1599. Kedatangan mereka di Kesultanan Aceh pada mulanya juga mendapat sambutan yang baik

⁹ Dany's Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 29

¹⁰ Muhammad. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, hlm. 125

dari pemerintah sebagaimana sambutan ketika mereka mengunjungi wilayah Banten. Akan tetapi karena adanya hasutan dari bangsa Portugis kemudian urusan menjadi meleset dan berakhir dengan peperangan. Pada saat itu Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil memang sudah bertekad untuk berdamai dengan bangsa Portugis, tetapi hal tersebut tidak dapat dipertahankan karena pihak Portugis yang rakus itu menunjukkan kembali tabiatnya sebagai penjajah. Bangsa Portugis memang menentang adanya hubungan baik antara Kesultanan Aceh dengan bangsa Belanda dan juga Inggris atas dasar mengancam monopoli perdagangan yang mereka perjuangkan.

Wujud dari ketidaksenangan Portugis atas hal tersebut di atas yaitu dengan cara mengadu domba antara pemerintah Kesultanan Aceh dengan pedagang-pedagang Belanda. Sehingga terjadilah penyerangan terhadap rombongan de Houtman yang dilakukan oleh pasukan pengamanan Kesultanan Aceh dan penyerangan tersebut dipimpin sendiri oleh Laksamana Kumalahayati. Penyerangan tersebut terjadi tidak semata-mata hanya karena adanya adu domba yang dilakukan oleh orang-orang Portugis. Akan tetapi juga terjadi karena adanya sikap melawan dari rombongan dua bersaudara tersebut ketika mereka ditangkap. Dalam penyerangan itu Cornelis de Houtman terbunuh dan ditangan Laksamana Kumalahayati sendiri Cornelis de Houtman meninggal. Peristiwa tersebut terjadi di atas sebuah geladag kapal milik Belanda dan pertarungan berlangsung satu lawan satu.

Waktu itu Laksamana Kumalahayati bersenjata rencong¹¹, sebuah senjata yang identik dengan semangat perjuangan rakyat di Kesultanan Aceh dalam mempertahankan serta menegakkan kebenaran. Senjata tersebut didesain oleh ahli senjata dengan bentuknya yang begitu rupa dan mengandung arti simbolik yang bertuliskan Arab dengan singkatan dari huruf: *Baa*, *Siin*, *Miim*, *Laam* dan *Haa* yang merupakan kepanjangan dari kata "Bismillah". Senjata ini dibuat pada masa Sultan al Kahar (1539-1571)M pada waktu itu bertujuan untuk membakar semangat jihad rakyat Kesultanan Aceh.¹² Rencong inipun sampai saat ini masih dikenal sebagai senjata khas daerah Nangroe Aceh Darussalam.

Peristiwa tersebut di atas merupakan sebuah peristiwa yang langka dalam perjalanan sejarah bangsa, seorang wanita yang dipandang sebagai makhluk lemah. Akan tetapi Laksamana Kumalahayati membuktikan bahwa wanita juga memiliki kekuatan dan keberanian berjuang dengan taruhan nyawa sekalipun, demi menegakkan dan mempertahankan kehormatan bangsanya. Kodratnya sebagai seorang wanita sepertinya tidak pernah menjadi penghalang bagi Laksamana Kumalahayati untuk terus berjuang mempertahankan wilayah Kesultanan Aceh dari serangan-serangan musuh.

Peristiwa pembunuhan Cornelis de Houtman di Negara Belanda cukup menghebohkan. Akan tetapi Belanda menghadapi kegagalan ini dengan kepala dingin. Setelah terjadinya peristiwa itu, adik dari

¹¹ Solichin Salam, *Malahayati Srikandi dari Aceh*, hlm. 29

¹² *Ibid*, hlm. 11

Cornelis de Houtman yakni Frederick de Houtman kemudian ditawan dan dipenjara. Frederick de Houtman cukup beruntung atas kejadian ini, karena ia berhasil luput dari pembunuhan. Hal tersebut dapat terjadi karena Frederick de Houtman dan rombongan tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap.¹³ Setelah terjadinya peristiwa ini, Frederick de Houtman ditawan dan dipenjara. Ia ditawan dan dipenjara di benteng Pidie oleh pemerintah Kesultanan Aceh selama dua tahun lebih. Dalam penjara Frederick de Houtman berhasil menyusun sebuah kamus Melayu-Belanda dan kamus tersebut saat ini merupakan kamus Melayu-Belanda yang tertua di Nusantara. Selain itu dari pengalaman perjalanannya ke Nusantara ia juga berhasil menyusun sebuah katalog mengenai bintang-bintang belahan bumi selatan yang dapat dimanfaatkan bagi para pengemudi kapal yang akan menjelajah ke Hindia Timur.¹⁴

Terjadinya peristiwa pembunuhan Cornelis de Houtman sebagaimana tersebut di atas tidak membuat takut dan jera bagi orang-orang Belanda untuk datang dan berkunjung kembali ke Kesultanan Aceh. Hal tersebut dibuktikan dengan datangnya kembali dua buah kapal berkebangsaan Belanda menuju ke Kesultanan Aceh. Kapal yang datang ke Kesultanan Aceh setelah terjadinya peristiwa tersebut dipimpin oleh Paulus Van Caerden. Mereka sampai di Pelabuhan Kesultanan Aceh tepatnya pada tanggal 21 November 1600. Ketika memasuki Pelabuhan Kesultanan Aceh mereka melakukan tindakan

¹³ Muhammad. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, hlm. 119

¹⁴ Danys Lombard, *Kerajaan Islam*, hlm. 30

curang yaitu menenggelamkan sebuah kapal dagang milik pemerintah kesultanan Aceh, yang mana kapal tersebut penuh dengan muatan lada. Sebelum ditenggelamkan, muatan lada tersebut dipindahkan ke dalam kapal mereka dan setelah itu kemudian mereka pergi begitu saja meninggalkan Pelabuhan Kesultanan Aceh untuk kembali ke negaranya.¹⁵ Dalam peristiwa ini memang sepertinya tidak ada tindakan dari pemerintah yang dilakukan terhadap rombongan Paulus Van Caerden. Akan tetapi tindakan atau sanksi baru diberikan kepada rombongan kapal dari Belanda yang datang ke Kesultanan Aceh kembali berikutnya.

Rombongan orang-orang Belanda berikutnya yang datang ke Kesultanan Aceh adalah rombongan yang dipimpin oleh Jacob Van Neck. Mereka sampai di Ibukota Kesultanan Aceh pada tanggal 31 Juni 1601. Rombongan ini sepertinya memiliki niat yang baik untuk menjalin hubungan dagang, karena sesampainya di Ibukota Kesultanan Aceh, mereka memperkenalkan diri terlebih dahulu terhadap Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil. Mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah pedagang dari bangsa Belanda dan datang ke Kesultanan Aceh untuk berdagang dan membeli sejumlah lada. Meskipun demikian, setelah Laksamana mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah berasal dari bangsa Belanda, maka ia langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk menahan dan memperlakukan mereka dengan tidak baik. Dalam hal ini Laksamana Kumalahayati memberitahukan kepada rombongan

¹⁵ Rusdi Sufi, dkk, *Warita Utama*, hlm.34

tersebut bahwa dua buah kapal berkebangsaan Belanda yang datang sebelumnya telah menenggelamkan sebuah kapal milik Kesultanan Aceh dan membawa sejumlah lada tanpa bayaran. Oleh sebab itu sebagai ganti rugi, Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil memerintahkan kepada Laksamana Kumalahayati untuk menawan setiap kapal dan orang-orang Belanda yang berkunjung ke Kesultanan Aceh.¹⁶ Selanjutnya dilakukan pembicaraan-pembicaraan untuk dicapainya kesepakatan.

Semua rombongan yang datang ke Kesultanan Aceh tersebut di atas dapat dikatakan sebagai rombongan-rombongan yang datang atas nama pribadi bukan utusan resmi dari pemerintah, sehingga tindakan-tindakannyapun juga tidak terkontrol. Mereka bertindak seenaknya saja tanpa memikirkan akibat-akibat dari perbuatannya. Sedangkan yang menanggung akibatnya adalah orang-orang yang datang belakangnya yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang tindakan-tindakan yang pernah dilakukan oleh rekan senegarannya. Apabila tindakan-tindakannya terus demikian maka akan menyulitkan bagi bangsa Belanda secara umum untuk menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Aceh. Menyadari hal tersebut kemudian pemerintah Belanda mulai mengirim utusan resminya untuk mengadakan hubungan dagang secara baik dengan pemerintah Kesultanan Aceh.

¹⁶ Rusdi Sufi, dkk, *Wanita Utama*, hlm.34

B. Peran Kumalahayati Sebagai Dewan Protokoler

Di samping sebagai seorang laksamana yang memiliki tugas mengamankan wilayah khususnya wilayah perairan di Kesultanan Aceh, Kumalahayati juga ditunjuk oleh Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil sebagai dewan protokoler. Sebuah tugas yang cukup bertolak belakang dengan tugasnya sebagai laksamana. Dalam menjalankan tugasnya ia dituntut untuk dapat bersikap sopan dan ramah, berbeda halnya dengan ketika ia sedang menghadapi musuh. Sebagai dewan protokoler, Laksamana Kumalahayati memiliki tugas untuk menyambut kedatangan tamu-tamu resmi asing dan juga diberi wewenang untuk mengadakan perundingan-perundingan awal sebelum tamu-tamu tersebut bertemu dengan Sultan.

Pengalaman beberapa warganya yang berkunjung ke Kesultanan Aceh sepertinya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Belanda, khususnya dalam mengadakan hubungan dagang dengan pemerintah Kesultanan Aceh. Sebagaimana kedatangan beberapa warga Belanda sebelumnya yang selalu membuat ulah dan merugikan pemerintah Kesultanan Aceh. Menyadari hal tersebut pemerintah Belanda yang pada waktu itu dipimpin oleh Pangeran Maurits segera mengirim utusan resmi untuk mengadakan hubungan dagang secara baik. Pemerintah Belanda menyadari jika warganya selalu melakukan perbuatan curang, maka pemerintah Kesultanan Aceh akan menutup hubungan dagang dengan negaranya seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Madura dan mereka akan kesulitan untuk mendapatkan barang dagangan yang langka di negaranya, seperti lada.

Utusan resmi dari pemerintah Belanda yang datang pertama kali di Kesultanan Aceh adalah rombongan beberapa buah kapal yang dipimpin oleh Gerard de Roy dan Laurens Bicker. Mereka sampai di Kesultanan Aceh pada tahun 1602 M. Rombongan tersebut diutus oleh Pangeran Maurits untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil. Surat tersebut intinya berisi tentang keinginan Pangeran Maurits untuk mengadakan hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Kesultanan Aceh. Dalam suratnya Pangeran Maurits juga meminta kepada Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil untuk tidak mempercayai lagi hasutan-hasutan dari pihak luar, seperti: Portugis. Selain itu Pangeran Maurits juga memohon kepada sultan untuk membebaskan beberapa warganya yang masih ditahan.¹⁷

Sebelum Laurens Bicker dan rombongan berhasil menemui sultan Alauddin Riayat Syah al Mukammil, mereka terlebih dahulu harus dapat meyakinkan Laksamana Kumalahayati bahwa mereka tidak akan mengulangi peristiwa-peristiwa sebagaimana yang dilakukan oleh rekan-rekan senegarannya terdahulu. Untuk meyakinkan Laksamana Kumalahayati, Laurens Bicker berjanji kepada Laksamana tersebut bahwa sesampainya di negaranya ia akan menuntut kompeni dagang Van Caerden. Kompeni dagang tersebut dituntut atas tindakan-tindakan curangnya yang telah berani menenggelamkan kapal milik Kesultanan Aceh yang berisi dengan muatan lada dan kemudian memindahkannya ke kapal mereka. Janji

¹⁷ Rusdi Sufi, dkk. *Wanita utama*, hlm. 35

tersebut dapat meyakinkan Laksamana Kumalahayati, sehingga rombongan tersebut diperkenankan untuk menemui sultan. Atas kesepakatan antara pihak Kesultanan dengan wakil dari bangsa Belanda, mereka diperbolehkan untuk berdagang di Kesultanan Aceh dan juga dibebaskannya Frederick de Houtman. Janji dari Laurens Bicker benar-benar ditepatinya. Denda sebesar 50.000 Golden dijatuhkan oleh Mahkamah Amsterdam kepada kompeni dagang Van Caerden dan denda tersebut benar-benar dibayarkan.¹⁸ Dari hasil dijatuhkannya sanksi atau denda inilah setidaknya akan mengembalikan kerugian negara atas tindakan-tindakan curang yang telah dilakukan oleh orang-orang Belanda.

Tamu resmi asing lainnya yang datang ke Kesultanan Aceh pada masa Laksamana Kumalahayati masih menjabat sebagai dewan protokoler adalah James Lancaster, seorang perwira dari Angkatan Laut Inggris. Dia datang ke Kesultanan Aceh bersama rombongan atas perintah dari Ratu Elisabeth dan tiba di Kesultanan Aceh pada tanggal 6 Juni 1602. Kedatangannya disambut dengan sambutan yang sangat meriah, yang mana acara sambutan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Laksamana Kumalahayati.¹⁹ Kedatangan mereka ke Kesultanan Aceh tujuannya adalah sama dengan kedatangan resmi dari pemerintah Belanda, karena mereka juga menyampaikan surat dari kepala pemerinthannya yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth yang isinya

¹⁸ *Ibid*, hlm. 35

¹⁹ Solichin Salam, *Malahayati Srikandi dari Aceh*, hlm. 32

juga menginginkan adanya hubungan persahabatan dan hubungan dagang antara Inggris dengan Kesultanan Aceh.

Dalam kunjungan perwakilan dari pemerintah Inggris tersebut, terdengar kabar bahwa ada orang-orang yang sedang mengadakan sabotase terhadap tamu Sultan yang akan segera pulang ke negaranya tersebut. Mereka adalah orang-orang Portugis yang tidak suka atas adanya hubungan diplomatik antara Inggris dengan Kesultanan Aceh. Dalam mengatasi permasalahan ini Laksamana Kumalahayati langsung mengatur strategi agar orang-orang Portugis tidak berhadapan langsung dengan orang-orang Inggris. Laksamana Kumalahayati mengatasi hal tersebut dengan cara menahan kapal-kapal Portugis di Pelabuhan Kesultanan Aceh selama 10 hari hingga perwakilan dari pemerintah Inggris itu jauh meninggalkan kesultanan.²⁰ Strategi tersebut dijalankan oleh Laksamana Kumalahayati yang merupakan salah satu upaya untuk menjaga kondisi Kesultanan Aceh agar tetap aman dan kondusif.

Setelah adanya kunjungan resmi dari bangsa-bangsa asing dan diperoleh kesepakatan dalam bidang perdagangan secara baik serta berhasilnya pemerintah meredam hasutan-hasutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, mulailah saat itu Kesultanan Aceh berada dalam kondisi yang kondusif. Kapal-kapal asing yang datang ke Kesultanan Aceh semakin banyak dan aktivitas perdagangan juga semakin ramai.

²⁰ Suny Ismail, ed, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980), hlm. 285

C. Akhir Perjuangan

Tidak ada sebuah perjuangan yang berakhir dengan sia-sia. Begitu juga dengan apa yang telah dikerjakan oleh Laksamana Kumalahayati. Perannya dalam mempertahankan Kesultanan Aceh dari serangan-serangan musuh ataupun perannya dalam pemerintahan memiliki pengaruh tersendiri terhadap perkembangan dan kemajuan kesultanan. Keberhasilannya dalam melakukan diplomasi dapat membawa Kesultanan Aceh menuju ke arah kemakmuran rakyatnya. Sebab dengan diplomasi permasalahan dapat diselesaikan tanpa harus menimbulkan korban jiwa maupun harta. Melalui diplomasi berbagai sanksi berhasil dijatuhkan kepada seorang ataupun sekelompok yang telah melakukan tindakan curang. Mengatasi permasalahan dengan tidak melakukan tindak kekerasan sepertinya lebih efektif, apabila dibandingkan menghadapi lawan dengan tindak kekerasan atau perang. Hal tersebut dapat berlaku selama jalan diplomasi masih dapat dilakukan.

Dalam masa-masa akhir tugasnya sebagai Laksamana, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, Laksamana Kumalahayati sepertinya lebih memilih melalui jalur diplomatik daripada dengan cara berperang. Sebagaimana ketika menghadapi kedatangan rombongan Laurens Bickers, meskipun mengetahui kalau rombongan tersebut memiliki kebangsaan yang sama dengan Van Cerden yang pernah melakukan tindakan curang di Kesultanan Aceh. Namun Laksamana Kumalahayati tidak langsung menyerang dan justru mengajak pemimpin rombongan tersebut untuk merundingkan

tentang permasalahan rekan senegaranya yang datang sebelumnya di Kesultanan. Akhirnya dicapai kesepakatan dari kedua pihak yakni diwajibkannya bagi Kompeni Van Caerden untuk membayar sejumlah uang denda.

Demikianlah sekilas tentang tugas ataupun peran yang dijalankan Laksamana Kumalahayati. Hal tersebut terus berlangsung hingga tahun 1604 M karena pada tahun tersebut sultan yang selama itu mempercayai dirinya untuk turut berperan aktif dalam menjalankan pemerintahan Kesultanan Aceh disingkirkan oleh putranya dan kemudian Sultan Alauddin Riayat Syah IV al Mukammil turun tahta.